

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2025



RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2024

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan terencana.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasarkan urgensi kebutuhan untuk dilaksanakan. Hal ini untuk dimaklumi bersama, bahwa kunci utama keberhasilan Kinerja Pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Aparaturnya. Selengkap dan sehebat apapun perangkat lainnya bila tidak diimbangi dengan kualitas aparatur yang melaksanakan, tidak akan bisa memberikan hasil yang optimal. Sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya pembangunan lainnya, apabila dilaksanakan oleh aparatur yang berkualitas akan memberikan manfaat yang optimal.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perwujudan rencana kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Karanganyar, Juli 2024  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Karanganyar

NUR AINI FARIDA, S.STP.,M.M.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770915 199602 2 001

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU I-1</b>	<b>I-1</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	II-14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-24
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2 Telaah Terhadap Tujuan dan Sasaran Dalam RPD .....	III-2
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	III-3
3.4 Program dan Kegiatan .....	III-5
3.5 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah 2024 .....	III-15
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .</b>	<b>IV-1</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat satu bulan setelah RKPD ditetapkan. Oleh Karena itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan Penunjang Kepegawaian Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini bertujuan untuk menjabarkan arah pembangunan di bidang kepegawaian untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

Sedangkan sasaran Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengambil sasaran ke empat yaitu “Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”.

Arah kebijakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan yang sudah di tetapkan oleh Kabupaten Karanganyar yaitu Perwujudan Karanganyar yang inovatif dalam konsep pembangunan *smart city* yang bewawasan lingkungan dengan prioritas peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah yang di fokuskan pada peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar (*smart city*)

Untuk mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan adanya Sumber Daya Aparatur yang mumpuni dan didukung oleh pengelola manajemen kepegawaian yang profesional. Oleh sebab itu, salah satu unsur

manajemen pemerintah yang tidak bisa dihindari dalam hal pengelolaannya adalah manajemen kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.

Diharapkan apa yang telah tertuang dalam Renja tahun 2025 ini bisa ditindaklanjuti dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, memperhatikan arah dan garis kebijakan yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Karanganyar – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
  26. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
  27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 16);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

- a. Tersusunnya arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran secara terarah, terpadu dan terkendali sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Tersusunnya alat analisa terhadap target kinerja yang telah ditetapkan secara logis berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

#### 1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini juga bertujuan sebagai upaya dalam mencapai tingkat capaian kinerja yang maksimal dari penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah disepakati bersama.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah

##### 1.1 Latar Belakang

Memuat Latar Belakang dari disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

##### 1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar hukum, Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

##### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar 2025.

##### 1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penyajian laporan penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

#### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2024) pada BKPSDM Kabupaten Karanganyar.

##### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

##### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

##### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

##### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

##### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dalam satu tahun kedepan BKPSDM Kabupaten Karanganyar.

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif di BKPSDM Kabupaten Karanganyar.

**BAB V PENUTUP**

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksana Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Evaluasi bertujuan untuk membuat perbaikan agar kegiatan yang terselenggara sesuai dengan rencana yang dirancang dan hasil evaluasi dimaksudkan untuk melakukan perencanaan lanjutan guna memperbaiki kekurangan dan kendala baik dalam proses administrasi maupun manajemen.

Demikian juga Rencana Kerja Perangkat Daerah di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu dievaluasi agar perencanaan di tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang lalu dan berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati di Tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dokumen Rencana Strategis dan dokumen Rencana Kerja disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai perangkat daerah yang mengurus kepegawaian, pendidikan dan pelatihan terus berupaya memberi kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian.

Untuk menunjang kegiatan dan pencapaian tujuan, alokasi anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 9.794.240.258, (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 9.144.566.933, (Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau 85,19 %. Untuk melaksanakan 3 Program dan 43 Sub Kegiatan. Realisasi 3 Program pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.713.333.008, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.430.805.172
2. Program Kepegawaian Daerah dari alokasi anggaran Rp. 2.681.907.250 realisasi sebesar Rp. 2.444.424.775
3. Program Pengembangan SDM dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.399.000.000 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.269.336.986

Dari 3 indikator kinerja yang ada di Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu :

1. Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi dari target 98 % realisasi sebesar 100 %.
2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan latihan dari target 25% realisasi sebesar 97,90 %.

- Persentase Penyelesaian Administrasi dari target 98 % realisasi sebesar 100 %.

Sedangkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh nilai sebesar 85,19 atau BB dengan kategori sangat baik yaitu akuntabilitas kinerjanya Baik, akuntabel memiliki sistem kerja yang handal. Untuk tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 69,55. Terjadi penurunan perolehan nilai hal ini terjadi karena terdapat perbedaan instrumen penilaian.

Indek Profesional Pegawai (IPP) yang selama ini menjadi nilai yang mendukung nilai Reformasi di Kabupaten Karanganyar dan sekaligus menjadi isu strategis di tahun 2023 mendapat nilai 64,47 dengan kategori Rendah.

Pada Tahun 2023 banyak prestasi yang sudah diraih oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia baik di Tingkat Kabupaten maupun secara regional yaitu :

- Penghargaan Anugrah Meritokrasi 2023 Kategori Nilai sistem Merit 257 (B) dan Indeks Malitas pengisian JPT 87,98 (B)
- BKN Award Peringkat 4 tahun 2023 Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Unit Barat Tipe Besar
- BKPSDM sebagai lembaga pengembangan Kompetensi yang adaptif untuk menyiapkan ASN BerAKHLAK.

Dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2024) pada BKPSDM Kabupaten Karanganyar, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1. pada halaman berikutnya.

Tabel 2.1.  
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Renstra 2023
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		IPP ASN	Nilai	65	64,47	99	65	65
2	Meningkatkan kinerja ASN yang berbasis kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	7	35,20	504,45	7	7
3	Meningkatkan pengembangan dan penataan karier PNS	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosika	%	98	98	100	98	98

	sesuai dengan kompetensi	n sesuai dengan kompetensi						
4	Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan mudah cepat dan tepat	Presentase penyelesaian administrasi kepegawaian	%	98	107,10	110,3	98	98
		Indek Kepuasan Masyarakat	%	85	84,60	99	85	85
		Nilai SAKIP	Nilai	75	-	-	75	-

Tabel 2.2.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n- 2)	Ringka san Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2024) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2024 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>									
<b>5.03</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>									
<b>5.03.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>									
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>90 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>%</b>			
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	100 %	2 dok	100	%	2 dok	2 dok	100%
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	100 %	1 dok	100	%	2 dok	1 dok	50%
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	100 %	1 dok	100	%	2 dok	-	-
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	100 %	1 dok	100	%	2 dok	1 dok	50%
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	100 %	1 dok	100	%	2 dok	-	-

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2024) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2024 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 jenis	100 %	8 jenis	100	%	4 Laporan	1 Laporan	25,0%
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	40 Laporan	100 %	40 Laporan	107,5	%	2 Laporan	-	-
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>90 %</b>		<b>100 %</b>			<b>90 %</b>	-	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	100 %	1 tahun	100	%	45 orang/bulan	37 orang/bulan	82,2%
5.03.01.2.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 bulan	100 %	12 bulan	100	%	4 laporan	1 laporan	25%
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>90 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>90 %</b>	-	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 jenis	100 %	8 jenis	100	%	4 paket	1 paket	25%
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 jenis	100 %	4 jenis	100	%	4 paket	3 paket	75%
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	100 %	3 jenis	100	%	3 paket	1 paket	33,3%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Ringk asan Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2024) TW 1	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra 2024 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 bulan	100 %	12 bulan	100	%	12 dok	3 dokumen	25%
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	2 jenis	100 %	2 jenis	100	%	12 lap	3 laporan	25%
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	8 jenis	100 %	8 jenis	100	%	4 dok	1 dokumen	25%
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>90 %</b>		<b>100 %</b>			<b>90 %</b>	-	
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	100 %	1 unit	100	%	-	-	-
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 jenis	100 %	10 jenis	100	%	5 unit	-	-
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>90 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>90 %</b>	-	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	430 surat	100 %	430 surat	100	%	12 lap	3 laporan	25%
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	100 %	12 bulan	100	%	12 lap	3 laporan	25%
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 jenis	100 %	7 jenis	100	%	4 lap	1 laporan	25%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023 (n- 2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Ringka san Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2024) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2024 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>90 %</b>	-	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 jenis	100 %	3 jenis	100	%	17 unit	4 unit	23,5%
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	-	-		-	-	-
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 jenis sarana	100 %	5 jenis sarana	100	%	30 unit	3 unit	10%
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 tahun	100 %	1 tahun	100	%	-	-	-
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>									
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>									
5.03.02.2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian</b>	<b>Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian</b>	<b>98 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>98 %</b>	-	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	600 orang	50 %	600 orang	132,5	%	3 dok	-	-
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	722 orang	100 %	722 orang	120,1	%	3 laporan	-	-
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	500 orang	100 %	500 orang	114,6	%	12 dok	3 dok	25%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2024) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2024 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	10.160 orang	100 %	10.160 orang	100	%	2 dok	-	-
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Pegawai	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2.500 orang	100 %	2.500 orang	142	%	2 dok	-	-
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	10.160 orang	100 %	10.160 orang	100	%	2 lap	-	-
<b>5.03.02.2.02.</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Jumlah Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>98 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>98 %</b>	-	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi, JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	1500 orang	90 %	1500 orang	101,3	%	4 dok	-	-
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1800 orang	98 %	1800 orang	93,6	%	2 dok	1 dok	50%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	200 jabatan	90 %	200 jabatan	211,5	%	4 dok	-	-
<b>5.03.02.2.03.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>98 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>98 %</b>	-	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan <i>Assesment Center</i>	Jumlah dokumen Pengelolaan <i>Assesment Center</i>	25 dok	100 %	25 dok	100	%	4 dok	-	-
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen Hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	202 orang	100 %	202 orang	123,3	%	225 orang	73 dok	32,4%
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	2 kegiatan	100 %	2 kegiatan	100	%	600 orang	-	-

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2024) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2024 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5.03.02.2.04.</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Jumlah Penilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>95 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>95 %</b>	<b>-</b>	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang tersusun dalam satu tahun	1 dok	100 %	1 dok	100	%	1 dok	-	-
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	8500 orang	100 %	8500 orang	100	%	2 dok	-	-
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	42 OPD	100 %	42 OPD	100	%	200 orang	39 orang	19,5%
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	190 orang	100 %	190 orang	146,3	%	200 orang	-	-
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	42 OPD	42 OPD	42 OPD	100	%	8.800 orang	-	-
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	10 sidang	100 %	10 sidang	120	%	10 Dok	2 Dok	20%
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>									
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>26 %</b>		<b>118 %</b>	<b>118</b>	<b>%</b>	<b>26 %</b>	<b>-</b>	

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2024) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2024 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2.500 orang	110 %	2.500 orang	118,6	%	2.600 orang	-	-
<b>5.04.02.2.02.</b>	<b>Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Jumlah Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>26 %</b>		<b>89 %</b>	88,9	%	<b>26 %</b>	-	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional kepemimpinan dan Prajabatan	9 orang	100 %	9 orang	88,9	%	13 lap	-	-

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

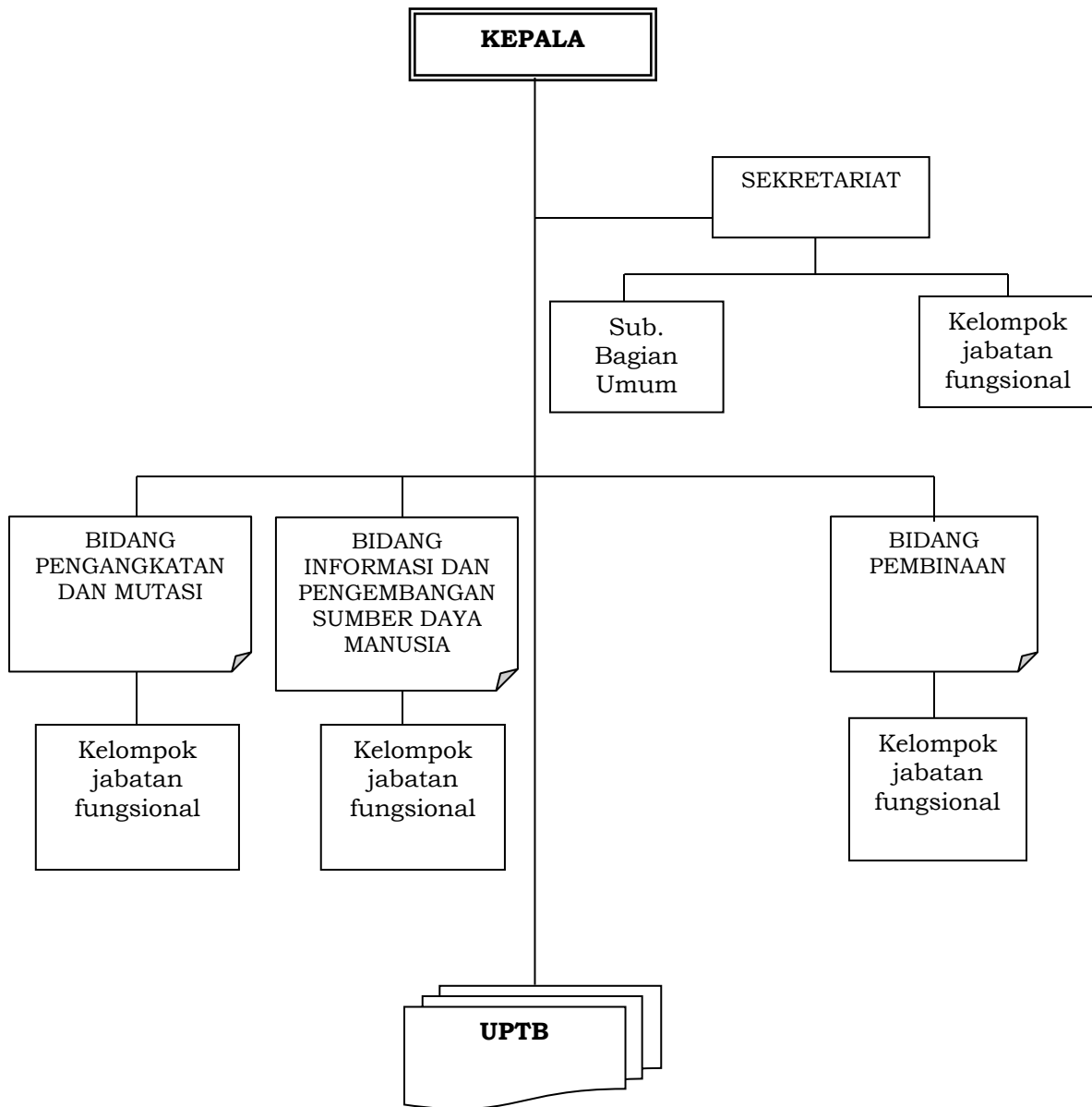
Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi:
  - Sub Bag. Umum; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Kepala Bidang informasi dan Pengembangan pengembangan sumber daya manusia, membawahi:
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Kepala Bidang pengangkatan Mutasi, membawahi:
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Kepala Bidang Pembinaan, membawahi:
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- f. UPTB; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar Bagan Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar terdapat pada halaman berikutnya.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KARANGANYAR



Gambar 2.1  
Bagan Susunan Organisasi  
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	Indeks Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn-n)	Tahun 2022 (thn-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn-n) TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Prosentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	-	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi yang dihitung dari jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibanding dengan pegawai fungsional	97	98	98	100	100	25	
2.	Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian	-	Rasio pegawai fungsional yang diukur dari jumlah pegawai PNS fungsional dibanding jumlah seluruh pegawai	97	98	98	100	100	25	
3.	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar yang dihitung dari jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas di banding jumlah SMA ke bawah	7	20	25	20	25	-	
4.	Prosentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-	Nilai SAKIP	68	75	76	69,55	-	-	

### 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 120 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, bidang pendidikan dan pelatihan, tidak melaksanakan urusan wajib jadi tidak menerapkan Standar Pelayanan Minimal.

Sebagai fungsi penunjang bidang Pemerintahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tiga Indeks Kinerja Kunci (IKK). Indeks Kinerja Kunci dan capaian IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar yang dihitung dari jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi keatas di banding Jumlah Pendidikan SMA ke bawah dikali 100%. Pada tahun 2024 hasil IKK sebesar 127,83.
2. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi yang dihitung dari jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat Kompetensi dibanding dengan seluruh jumlah pegawai fungsional dikali 100%. Hasil IKK untuk tahun 2024 adalah sebesar 79,3.
3. Rasio pegawai fungsional yang diukur dari jumlah pegawai PNS Fungsional dibanding jumlah seluruh pegawai. Hasil IKK untuk tahun 2024 adalah sebesar 22.

Pada tabel dibawah kami sajikan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :

Tabel. 2.4.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra BKN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKN	Permasalahan Pelayanan BKPSDM Karanganyar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p><b>Sasaran Strategis</b></p> <p>a. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN</p> <p>c. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas”</p>	<p>1. Kompetensi sumber daya ASN kurang optimal</p> <p>2. Manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi</p> <p>3. Manajemen mutu dalam merit system belum optimal;</p>	<p>Ada perbedaan periodisasi dokumen</p> <p>Koordinasi internal Belum optimal</p>	<p>Koordinasi antara BKN dan daerah</p> <p>Peraturan menuju Sistem Merit telah tersedia</p>

<p>d. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN)</p> <p>e. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima</p> <p>f. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN</p> <p>g. “Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel”</p>	<p>4. Sistem Penilaian Kinerja ASN belum optimal</p>		
---	--	--	--

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Karanganyar, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah;
 

Secara umum program penunjang Urusan Pemerintahan dimaksud tidak ada kendala semua berjalan sesuai dengan program. Tetapi satu kendala yaitu masih kurangnya kendaraan mobil dan motor sebagai sarana mobilitas karena banyaknya kendaraan yang sudah mulai rusak.
2. Program Kepegawaian Daerah;
  - a. Kualitas disiplin aparatur yang masih perlu untuk ditingkatkan;
  - b. Perlu terus menerus meningkatkan kesadaran ASN Kabupaten Karanganyar terhadap nilai-nilai lembaga pernikahan untuk mengantisipasi meningkatnya ajukan ijin perceraian ASN;
  - c. Jumlah pengadaan ASN yang tidak sebanding dengan ASN yang pensiun mengakibatkan adanya kekurangan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - a. Dengan adanya perubahan formasi jabatan sebagai akibat penerapan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga banyak promosi dan mutasi pejabat struktural. Hal tersebut juga berdampak pada bertambahnya jumlah pejabat struktural yang harus mengikuti Diklat Kepimimpinan (Diklat Struktural) sesuai eselonnya, tetapi tidak dibarengi dengan tersedianya dana yang cukup untuk pengembangan sumber daya manusia.
  - b. Selain itu di tahun 2023 dengan adanya Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan Jabatan administrasi ke dalam jabatan Fungsional, sehingga masih diperlukan pengembangan SDM di jabatan baru yang harus dibarengi dengan penyediaan anggaran.

Sedangkan isu penting yang harus ditindaklanjuti saat ini di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah meningkatkan Nilai Sistem Merit. Sesuai dengan Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengamanatkan bahwa “Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit” dengan pengertian kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan merata dengan tanpa diskriminasi. Jadi diupayakan semua program dan kegiatan bisa mendukung untuk peningkatan nilai sistem merit.

Sistem merit ini menggantikan Indeks Profesional Pegawai (IPP) yang dahulu menjadi nilai yang mendukung nilai di kabupaten pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.4.  
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD OPD TAHUN 2025  
 Kabupaten Karanganyar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	RANCANGAN AKHIR RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				<b>9.589.172.381</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				<b>10.800.000.000</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>			<b>90 %</b>	<b>6.332.314.031</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>			<b>90 %</b>	<b>6.700.000.000</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Prosentasi tertib perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja</b>	<b>90 %</b>	<b>239.380.850</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Prosentasi tertib perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja</b>	<b>90 %</b>	<b>104.000.000</b>	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	BKPSDM	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	40.420.300	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	BKPSDM	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	11.000.000	
2.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	6.000.000	
3.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	5.004.700	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	7.000.000	
4.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	7.000.000	
5.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan	1 dok	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan	1 dok	7.000.000	

No	RANCANGAN AKHIR RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
			DPA-SKPD					DPA-SKPD			
6.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	18.000.000	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	163.955.850	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	48.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Prosentase tertib Administrasi keuangan</b>	<b>90 %</b>	<b>5.395.231.081</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Prosentase tertib Administrasi keuangan</b>	<b>90 %</b>	<b>5.248.500.000</b>	
8.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/bulan	5.380.231.081	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/bulan	5.230.500.000	
9.	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	15.000.000	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	18.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>270.292.100</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>299.500.000</b>	
10.	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BKPSDM	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	5.999.000	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BKPSDM	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	7.000.000	
11.	Penyediaan bahan logistik kantor	BKPSDM	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	4 paket	26.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	BKPSDM	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	4 paket	35.000.000	

No	RANCANGAN AKHIR RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
			disediakan					disediakan			
12.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	25.963.100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	25.000.000	
13.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dok	1.380.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dok	2.500.000	
14.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	12 laporan	185.950.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	12 laporan	200.000.000	
15.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dok	25.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dok	30.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>-</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>340.000.000</b>	
16.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 unit	100.000.000	
17.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	-	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	240.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>90 %</b>	<b>257.745.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>90 %</b>	<b>274.000.000</b>	
18.	Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6.600.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	7.900.000	
19.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	12 laporan	130.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	12 laporan	127.100.000	

No	RANCANGAN AKHIR RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
			daya air dan listrik yang disediakan					daya air dan listrik yang disediakan			
20.	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	121.145.000	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	139.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>169.665.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>434.000.000</b>	
21.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 unit	132.655.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 unit	260.000.000	
22.	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM	Jumlah mebel yang dipelihara	25 unit	-	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM	Jumlah mebel yang dipelihara	25 unit	30.000.000	
23.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	27.010.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	24.000.000	
24.	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	10.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	120.000.000	
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>85 %</b>	<b>1.464.940.000</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>85 %</b>	<b>2.550.000.000</b>	
	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian</b>	<b>98 %</b>	<b>507.939.700</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian</b>	<b>98 %</b>	<b>931.500.000</b>	
25.	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3 dok	200.000.000	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3 dok	700.000.000	

No	RANCANGAN AKHIR RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
26.	Evaluasi pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	3 laporan	15.000.000	Evaluasi pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	3 laporan	35.000.000	
27.	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 dok	88.311.700	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 dok	80.000.000	
28.	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	2 dok	125.438.000	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	2 dok	90.000.000	
29.	Pengelolaan data pegawai	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 dok	10.000.000	Pengelolaan data pegawai	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 dok	6.500.000	
30.	Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	BKPSDM	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	2 laporan	69.190.000	Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	BKPSDM	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	2 laporan	20.000.000	
	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>98 %</b>	<b>344.812.000</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>98 %</b>	<b>602.000.000</b>	
31.	Pengelolaan mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi , JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 dok	30.000.000	Pengelolaan mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi , JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 dok	30.000.000	
32.	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	2 dok	40.000.000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	2 laporan	72.000.000	
33.	Pengelolaan promosi ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 dok	274.812.000	Pengelolaan promosi ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 dok	500.000.000	
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>98 %</b>	<b>252.000.000</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>98 %</b>	<b>309.500.000</b>	
34.	Pengelolaan	BKPSDM	Jumlah dokumen	4 dok	210.000.000	Pengelolaan	BKPSDM	Jumlah dokumen	4 dok	254.500.000	

No	RANCANGAN AKHIR RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Assesment Center		Pengelolaan Assesment Center			Assesment Center		Pengelolaan Assesment Center			
35.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen Hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	2 orang	12.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen Hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	250 orang	20.000.000	
36.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	2 orang	30.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	300 orang	35.000.000	
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>95 %</b>	<b>360.188.300</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>95 %</b>	<b>707.000.000</b>	
37.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dok	57.287.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dok	75.000.000	
38.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 dok	144.999.250	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 dok	310.000.000	
39.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	800 orang	12.573.050	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	800 orang	60.000.000	
40.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	200 orang	11.429.950	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	200 orang	12.000.000	
41.	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	8800 orang	62.749.050	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	8800 orang	150.000.000	
42.	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	BKPSDM	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	10 dok	71.150.000	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	BKPSDM	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	10 dok	100.000.000	
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>											
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				<b>26 %</b>	<b>1.791.918.350</b>				<b>26 %</b>	<b>1.550.000.000</b>	

No	RANCANGAN AKHIR RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>26 %</b>	<b>469.936.750</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>26 %</b>	<b>1.000.000.000</b>	
43.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2.700 orang	469.936.750	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2.700 orang	1.000.000.000	
	<b>Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		<b>Jumlah Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>26 %</b>	<b>1.321.981.600</b>	<b>Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		<b>Jumlah Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>26 %</b>	<b>550.000.000</b>	
44.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional kepemimpinan dan Prajabatan	14 laporan	1.321.981.600	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	14 laporan	550.000.000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal RKPD adalah acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu pada tujuan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Daerah” dan mengambil sasaran keempat pembangunan Daerah yaitu “Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”.

Rancangan awal RKPD tidak berbeda dengan analisa kebutuhan saat ini. Hal ini karena pada penyusunan rancangan awal sudah disusun sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas daerah untuk tahun 2025 yaitu Perwujudan Karanganyar yang inovatif dalam konsep pembangunan *smart city* yang bewawasan lingkungan dengan Prioritas peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah yang di fokuskan pada peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar (*smart city*)

Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.5. pada berikutnya:

Tabel 2.5  
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2022

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi yang menangani urusan pemerintahan bidang kepegawaian, bidang pendidikan dan pelatihan sebelum menyusun anggaran untuk tahun yang akan datang, akan menampung usulan dari Perangkat Daerah dan masyarakat yang akan kita sesuaikan dan tindaklanjuti dalam sub kegiatan yang ada dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada. Dari kelompok masyarakat atau desa dan kelurahan maupun kecamatan sampai saat ini belum ada yang masuk melalui musrenbang ataupun proposal.

Sedangkan untuk perbaikan pelayanan secara menyeluruh kita akan menggunakan hasil Survei Kepuasan dengan responden ASN yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dari hasil survei bisa dianalisa pelayanan apa yang kurang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan akan kita tindak lanjuti pada Rencana Kerja yang akan datang.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

##### 3.1.1 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Tujuan pembangunan Badan Kepegawaian Negara tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial);
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan *talent pool*); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (on-line);
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan *good governance*; dan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya Badan Kepegawaian Negara menjabarkan 5 (lima) Tujuan yakni:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN);
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN;
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Dalam menentukan Sasaran Strategis, BKN menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 empat perspektif, yakni *stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective*, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN
2. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
3. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas
4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN)
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima
6. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
7. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

### **3.2 Telaah Terhadap Tujuan dan Sasaran Dalam RPD**

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan.
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal.
4. Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi.
5. Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.

### **3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel 3.2 yang terdapat pada halaman berikutnya.

Tabel 3.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2025  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.		Indek Reformasi Birokrasi	Indek	73
		Meningkatkan kualitas, profesionalis, dan kuantitas ASN berbasis sistem merit	Nilai Sistem Merit	Nilai	260
		Meningkatkan tata Kelola dan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	78

### 3.4 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah, maka Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang merupakan kewenangan daerah, mengambil sasaran ke-4, dari sasaran Pembangunan daerah yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi, dan arah kebijakan tahun 2025 yaitu perwujudan Karanganyar yang inovatif dalam konsep pembangunan *smart city* yang berwawasan lingkungan, maka sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka prioritas pada tahun 2025 adalah peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah yang di fokuskan pada peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar (*smart city*)

Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Merencanakan 3 program, 12 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan rencana anggaran seluruhnya sebesar Rp 10.800.000.000 Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD
  3. Koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA – SKPD
  4. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA – SKPD
  5. Koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen DPA – SKPD
  6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  7. Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  2. Penyediaan bahan logistik kantor
  3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  6. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - 2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1. Penyediaan jasa surat menyurat
  - 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - 2. Pemeliharaan mebel
  - 3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - 4. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

## **2. Program Kepegawaian Daerah**

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
  - 1. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
  - 2. Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN
  - 4. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
  - 5. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
  - 6. Pengelolaan data pegawai
  - 7. Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian
- b. Mutasi dan Promosi ASN
  - 1. Pengelolaan mutasi ASN
  - 2. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
  - 3. Pengelolaan promosi ASN
- c. Pengembangan Kompetensi ASN
  - 1. Pengelolaan Assesment Center
  - 2. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
  - 3. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - 1. Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
  - 2. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
  - 3. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
  - 4. Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai
  - 5. Pembinaan disiplin ASN
  - 6. Pelayanan proses ijin perceraian pegawai

## **3. Program Pendidikan dan Pelatihan**

- a. Pengembangan Kompetensi Teknis
  - 1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintah konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.
- b. Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan.

Di tahun 2025 ini semua program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, perubahan terjadi karena penyesuaian kemampuan anggaran yang ada.

Program dan kegiatan yang direncanakan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Hal ini dikarenakan seluruh target kegiatan yang akan dilaksanakan sudah diperhitungkan dengan matang dan sesuai dengan dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra.

Tabel 3.2.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2025  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>					<b>9.589.172.381</b>			<b>12.632.860.000</b>
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>				<b>90 %</b>	<b>6.332.314.031</b>			<b>7.869.000.000</b>
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentasi tertib perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja</b>		<b>90 %</b>	239.380.850			<b>90 %</b>	<b>117.500.000</b>
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	BKPSDM	2 dok	40.420.300	Dana Alokasi Umum		2 dok	11.500.000
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	BKPSDM	1 dok	5.000.000	Dana Alokasi Umum		2 dok	6.000.000
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPSDM	1 dok	5.004.700	Dana Alokasi Umum		2 dok	10.000.000
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	BKPSDM	1 dok	5.000.000	Dana Alokasi Umum		2 dok	10.000.000
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM	1 dok	5.000.000	Dana Alokasi Umum		2 dok	10.000.000
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan	Jumlah laporan capaian	BKPSDM	4 Laporan	15.000.000	Dana		4 laporan	20.000.000

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Alokasi Umum			
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	BKPSDM	2 Laporan	163.955.850	Dana Alokasi Umum		2 laporan 50.000.000	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase tertib Administrasi keuangan</b>		<b>90 %</b>	<b>5.395.231.081</b>			<b>90 %</b> <b>6.020.000.000</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	BKPSDM	45 orang/bulan	5.380.231.081	Dana Alokasi Umum		45 orang/bulan 6.000.000.000	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BKPSDM	4 laporan	15.000.000	Dana Alokasi Umum		4 laporan 20.000.000	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>90 %</b>	<b>270.292.100</b>			<b>90 %</b> <b>338.000.000</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	BKPSDM	4 paket	5.999.000	Dana Alokasi Umum		4 paket 10.000.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	BKPSDM	4 paket	26.000.000	Dana Alokasi Umum		4 paket 40.000.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM	3 paket	25.963.100	Dana Alokasi		3 paket 30.000.000	

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penggandaan	yang disediakan				Umum			
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	BKPSDM	12 dokumen	1.380.000	Dana Alokasi Umum		12 dok 3.000.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	BKPSDM	12 laporan	185.950.000	Dana Alokasi Umum		12 laporan 220.000.000	
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	BKPSDM	4 dokumen	25.000.000	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen 35.000.000	
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>90 %</b>	<b>-</b>			<b>90 %</b> <b>600.000.000</b>	
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	BKPSDM	5 unit	-	Dana Alokasi Umum		1 unit 350.000.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	BKPSDM	5 unit	-	Dana Alokasi Umum		5 unit 250.000.000	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang</b>		<b>90 %</b>	<b>257.745.000</b>			<b>90 %</b> <b>308.500.000</b>	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM	12 laporan	6.600.000	Dana Alokasi Umum		12 laporan 8.500.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	BKPSDM	12 laporan	130.000.000	Dana Alokasi Umum		12 laporan 150.000.000	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan	BKPSDM	4 laporan	121.145.000	Dana Alokasi		4 laporan 150.000.000	

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor yang disediakan				Umum			
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>90 %</b>	<b>169.665.000</b>			<b>90 %</b> <b>485.000.000</b>	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	BKPSDM	20 unit	132.655.000	Dana Alokasi Umum	-	275.000.000	
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	BKPSDM	25 unit	-	Dana Alokasi Umum	25 unit	30.000.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BKPSDM	20 unit	27.010.000	Dana Alokasi Umum	20 Unit	30.000.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BKPSDM	1 unit	10.000.000	Dana Alokasi Umum	1 unit	150.000.000	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>85 %</b>	<b>1.464.940.000</b>	<b>1.464.940.000</b>	<b>85 %</b>	<b>3.048.860.000</b>	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian</b>	<b>Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian</b>		<b>98 %</b>	<b>507.939.700</b>		<b>98 %</b>	<b>1.132.000.000</b>	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	3 dokumen	200.000.000	Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	900.000.000	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	BKPSDM	3 laporan	15.000.000	Dana Alokasi Umum	3 laporan	40.000.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil	BKPSDM	12	88.311.700	Dana	12	85.000.000	

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Administrasi Pemberhentian	kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian		dokumen		Alokasi Umum		dokumen	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	BKPSDM	2 dokumen	125.438.000	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	80.000.000
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Pegawai	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	BKPSDM	2 dokumen	10.000.000	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	7.000.000
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	BKPSDM	2 laporan	69.190.000	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	20.000.000
<b>5.03.02.2.02.</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Jumlah Mutasi dan Promosi ASN</b>		<b>98 %</b>	<b>344.812.000</b>			<b>98 %</b>	<b>798.860.000</b>
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi , JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	BKPSDM	4 dokumen	30.000.000	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	30.000.000
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	BKPSDM	2 dokumen	40.000.000	Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	79.860.000
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	BKPSDM	4 dokumen	274.812.000	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	689.000.000
<b>5.03.02.2.03.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN</b>		<b>98 %</b>	<b>252.000.000</b>			<b>85 %</b>	<b>260.000.000</b>
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan <i>Assesment Center</i>	Jumlah dokumen Pengelolaan <i>Assesment Center</i>	BKPSDM	4 dokumen	210.000.000	Dana Alokasi Umum		4 dokumen	200.000.000
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen Hasil pendidikan lanjutan ASN	BKPSDM	2 orang	12.000.000	Dana Alokasi		200 orang	20.000.000

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		yang dikelola				Umum			
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	BKPSDM	2 orang	30.000.000	Dana Alokasi Umum		200 orang 40.000.000	
<b>5.03.02.2.04.</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Jumlah Penilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		<b>95 %</b>	<b>360.188.300</b>			<b>95 %</b> <b>858.000.000</b>	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM	1 dokumen	57.287.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen 80.000.000	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKPSDM	2 dokumen	144.999.250	Dana Alokasi Umum		2 dokumen 320.000.000	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	BKPSDM	800 orang	12.573.050	Dana Alokasi Umum		800 orang 65.000.000	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	BKPSDM	200 orang	11.429.950	Dana Alokasi Umum		200 orang 13.000.000	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	BKPSDM	8800 orang	62.749.050	Dana Alokasi Umum		8800 orang 250.000.000	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	BKPSDM	10 dokumen	71.150.000	Dana Alokasi Umum		10 dokumen 130.000.000	
<b>5.04.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>26 %</b>	<b>1.791.918.350</b>			<b>26 %</b> <b>1.715.000.000</b>	
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		<b>26 %</b>	<b>469.936.750</b>			<b>27 %</b> <b>1.250.000.000</b>	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	BKPSDM	2.700 orang	469.936.750	Dana Alokasi		2.600 orang 1.250.000.000	

Kode Rek	Urusan / bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum					Umum			
<b>5.04.02.2.02.</b>	<b>Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Jumlah Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		<b>26 %</b>	<b>1.321.981.600</b>			<b>27 %</b> <b>465.000.000</b>	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM	14 laporan	1.321.981.600	Dana Alokasi Umum		10 laporan 465.000.000	

### 3.5 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah 2025

Tantangan memberi kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri, sementara peluang membuka pintu untuk inovasi dan kemajuan. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tantangan bisa memperkuat kemampuan adaptasi dan kreativitas dalam menghadapi perubahan, sementara peluang memberi kesempatan untuk memberikan layanan yang lebih baik dan efisien kepada ASN.

Saat ini tantangan dan peluang yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
2. Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 tahun kedepan yang perlu disiapkan penggantinya;
3. Masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS;
4. Perlunya pendidikan penjenjangan untuk meningkatkan kompetensi para ASN;
5. Adanya Reformasi Birokrasi Penyederhanaan Kepagawaian.

Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan adalah :

1. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil;
2. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional;
3. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS;
4. Sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama 3 tahun dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, dan secara tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan dimana Rencana Kerja Tahunan ini mengacu pada rencana Strategis yang sudah ditetapkan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah urusan penunjang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendukung program pemerintah Daerah melalui bidang kepegawaian khususnya di peningkatan nilai sistem Merit. Sehingga capaian nilai sistem Merit dijadikan isu strategis bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Langkah-langkah yang ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menghadapi isu strategis untuk meningkatkan nilai sistem Merit adalah :

- a. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya;
- b. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN;
- c. Memberikan kepastian karier dan melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
- d. Mengelola ASN secara efektif dan efisien;
- e. Memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja.

Pencapaian tujuan sesuai Renstra dan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 untuk pendanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

## Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2025	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2026	Ket. Prioritas Pembangunan Nasional
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>								<b>9.589.172.381</b>		<b>12.632.860.000</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>								<b>6.332.314.031</b>	<b>90 %</b>	<b>7.869.000.000</b>	
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	BKPSDM	Nilai SAKIP	<b>78</b>	<b>Prosentasi tertib perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja</b>	<b>90 %</b>	<b>Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</b>	<b>100 %</b>	<b>239.380.850</b>	<b>90 %</b>	<b>117.500.000</b>	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	40.420.300	2 dok	11.500.000	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	5.000.000	2 dok	6.000.000	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	5.004.700	2 dok	10.000.000	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	5.000.000	2 dok	10.000.000	
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan	1 dok	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	5.000.000	2 dok	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2025	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2026	Ket. Prioritas Pembangunan Nasional
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					DPA-SKPD							
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	15.000.000	4 laporan	20.000.000	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	163.955.850	2 laporan	50.000.000	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	BKPSDM	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>78</b>	<b>Prosentase tertib Administrasi keuangan</b>	<b>90 %</b>	<b>Jumlah penyediaan pelayanan keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>5.395.231.081</b>	<b>90 %</b>	<b>6.020.000.000</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/bulan	Jumlah penyediaan pelayanan keuangan	100 %	5.380.231.081	45 orang/bulan	6.000.000.000	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	15.000.000	4 laporan	20.000.000	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	BKPSDM	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>78</b>	<b>Jumlah Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>270.292.100</b>	<b>90 %</b>	<b>338.000.000</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	4 paket	Terwujudnya pelayanan administrasi	100 %	5.999.000	4 paket	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2025	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2026	Ket. Prioritas Pemba ngunan Nasional
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Tar get	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Kantor				kantor yang disediakan		perkantoran					
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	26.000.000	4 paket	40.000.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25.963.100	3 paket	30.000.000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dok	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.380.000	12 dok	3.000.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	12 laporan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	185.950.000	12 laporan	220.000.000	
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dok	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25.000.000	4 dok	35.000.000	
<b>5.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	BKPSDM	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>78</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>Tersedianya pelayanan sarana dan prasarana pegawai</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>90 %</b>	<b>600.000.000</b>	
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 unit	tersedianya pelayanan sarana dan prasarana pegawai	100 %	-	1 unit	350.000.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	tersedianya pelayanan sarana dan prasarana pegawai	100 %	-	5 unit	250.000.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2025	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2026	Ket. Prioritas Pemba ngunan Nasional
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Tar get	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	BKPSDM	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>78</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>90 %</b>	<b>tersedianya pelayanan penunjang perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>257.745.000</b>	<b>90 %</b>	<b>308.500.000</b>	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	tersedianya pelayanan penunjang perkantoran	100 %	6.600.000	12 laporan	8.500.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	tersedianya pelayanan penunjang perkantoran	100 %	130.000.000	12 laporan	150.000.000	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	tersedianya pelayanan penunjang perkantoran	100 %	121.145.000	4 laporan	150.000.000	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	BKPSDM	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>78</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90 %</b>	<b>terpeliharanya sarana dan prasarana kantor</b>	<b>100 %</b>	<b>169.665.000</b>	<b>90 %</b>	<b>485.000.000</b>	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 unit	terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	132.655.000	20 unit	275.000.000	
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah mebel yang dipelihara	25 unit	terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	-	25 unit	30.000.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	27.010.000	20 unit	30.000.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2025	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2026	Ket. Prioritas Pemba ngunan Nasional
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Tar get	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	10.000.000	1 unit	150.000.000	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>							<b>1.464.940.000</b>		<b>3.048.860.000</b>		
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian</b>	BKPSDM	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>78</b>	<b>Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian</b>	<b>98 %</b>	<b>Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian</b>	<b>100 %</b>	<b>507.939.700</b>	<b>98 %</b>	<b>1.132.000.000</b>	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3 dok	Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	100 %	200.000.000	3 dok	900.000.000	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	3 laporan	Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	100 %	15.000.000	3 laporan	40.000.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 dok	Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	100 %	88.311.700	12 dok	85.000.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	2 dok	Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	100 %	125.438.000	2 dok	80.000.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Pegawai	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 dok	Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian dan informasi	100 %	10.000.000	2 dok	7.000.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2025	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2026	Ket. Prioritas Pemba ngunan Nasional
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Tar get	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	2 laporan	kepegawaian Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	100 %	69.190.000	2 laporan	20.000.000	
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	BKPSDM	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>78</b>	<b>Jumlah Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>98 %</b>	<b>Terwujudnya penataan ASN sesuai dengan analisis jabatan dan kompetensi ASN</b>	<b>100 %</b>	<b>344.812.000</b>	<b>98 %</b>	<b>798.860.000</b>	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi , JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 dok	Terwujudnya penataan ASN sesuai dengan analisis jabatan dan kompetensi ASN	100 %	30.000.000	4 dok	30.000.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	2 dok	Terwujudnya penataan ASN sesuai dengan analisis jabatan dan kompetensi ASN	100 %	40.000.000	6 dok	79.860.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 dok	Terwujudnya penataan ASN sesuai dengan analisis jabatan dan kompetensi ASN	100 %	274.812.000	4 dok	689.000.000	
<b>5.03.02.2.03.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	BKPSDM	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>78</b>	<b>Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>98 %</b>	<b>Tersedianya pengembangan kompetensi bagi ASN</b>	<b>100 %</b>	<b>252.000.000</b>	<b>98 %</b>	<b>260.000.000</b>	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2025	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2026	Ket. Prioritas Pemba ngunan Nasional
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Tar get	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan <i>Assesment Center</i>	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen Pengelolaan <i>Assesment Center</i>	4 dok	Tersedianya pengembangan kompetensi bagi ASN	100 %	210.000.000	4 dok	200.000.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen Hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	2 orang	Tersedianya pengembangan kompetensi bagi ASN	100 %	12.000.000	200 orang	20.000.000	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	2 orang	Tersedianya pengembangan kompetensi bagi ASN	100 %	30.000.000	200 orang	40.000.000	
<b>5.03.02.2.04.</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	BKPSDM	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>78</b>	<b>Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>95 %</b>	<b>Tersedianya pelayanan kinerja aparatur ASN yang lengkap</b>	<b>100 %</b>	<b>360.188.300</b>	<b>95 %</b>	<b>858.000.000</b>	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dok	Tersedianya dokumen penyusunan kebijakan penilaian dan kinerja aparatur	100 %	57.287.000	1 dok	80.000.000	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 dok	Tersedianya pelayanan kinerja aparatur ASN yang lengkap	100 %	144.999.250	2 dok	320.000.000	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	800 orang	Tersedianya pelayanan kinerja aparatur ASN yang lengkap	100 %	12.573.050	800 orang	65.000.000	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	200 orang	Tersedianya pelayanan kinerja aparatur ASN yang lengkap	100 %	11.429.950	200 orang	13.000.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2025	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2026	Ket. Prioritas Pemba ngunan Nasional
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Tolok Ukur	Tar get	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	8800 orang	Tersedianya pelayanan kinerja aparatur ASN yang lengkap	100 %	62.749.050	8800 orang	250.000.000	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	10 dok	Tersedianya pelayanan kinerja aparatur ASN yang lengkap	100 %	71.150.000	10 dok	130.000.000	
<b>5.04.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								<b>1.791.918.350</b>		<b>1.715.000.000</b>	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	BKPSDM	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>78</b>					<b>1.791.918.350</b>		<b>1.715.000.000</b>	
<b>5.04.02.2.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	BKPSDM	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>78</b>	<b>Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>26 %</b>	<b>Terpenuhinya pengembangan kompetensi teknis bagi ASN</b>	<b>100 %</b>	<b>469.936.750</b>	<b>27 %</b>	<b>1.250.000.000</b>	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2.700 orang	Terpenuhinya pengembangan kompetensi teknis bagi ASN	100 %	469.936.750	2.600 orang	1.250.000.000	
<b>5.04.02.2.02.</b>	<b>Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan</b>	BKPSDM	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>78</b>	<b>Jumlah Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>26 %</b>	<b>Tersedianya sertifikasi kelembagan kompetensi manajerial dan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.321.981.600</b>	<b>27 %</b>	<b>465.000.000</b>	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2025	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2026	Ket. Prioritas Pemba ngunan Nasional	
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
	<b>Fungsional</b>							<b>fungsional</b>					
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional kepemimpinan dan Prajabatan	14 laporan		Tersedianya sertifikasi kelembagan kompetensi manajerial dan fungsional	100 %	1.321.981.600	10 laporan	465.000.000	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dalam menunjang tercapainya tujuan dan sasaran Kabupaten Karanganyar serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan sesama lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar baik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maupun dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Sebagai rencana tindak lanjut untuk tahun-tahun yang akan datang dengan keterbatasan kemampuan pendanaan dari pemerintah, dan Sumber Daya Manusia yang semakin sedikit jumlahnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berusaha meningkatkan nilai sistem Merit dengan bekerjasama dengan dinas terkait baik di tingkat yang lebih tinggi maupun yang sejajar dan tentunya memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan profesionalitas pegawai, melalui program dan kegiatan yang ada.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini kami susun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan umum penganggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2025 mendatang.

Dengan selesainya dokumen ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen formalitas rutin semata namun lebih daripada itu dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam perencanaan penganggaran pada Tahun 2025 serta menjadi pedoman BKPSDM Kabupaten Karanganyar dalam menetapkan program kegiatan beserta besaran anggarannya.

Pj. BUPATI KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Baperlitbang	



## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dalam menunjang tercapainya tujuan dan sasaran Kabupaten Karanganyar serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan sesama lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar baik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maupun dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Sebagai rencana tindak lanjut untuk tahun-tahun yang akan datang dengan keterbatasan kemampuan pendanaan dari pemerintah, dan Sumber Daya Manusia yang semakin sedikit jumlahnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berusaha meningkatkan nilai sistem Merit dengan bekerjasama dengan dinas terkait baik di tingkat yang lebih tinggi maupun yang sejajar dan tentunya memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan profesionalitas pegawai, melalui program dan kegiatan yang ada.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini kami susun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan umum penganggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2025 mendatang.

Dengan selesainya dokumen ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen formalitas rutin semata namun lebih daripada itu dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam perencanaan penganggaran pada Tahun 2025 serta menjadi pedoman BKPSDM Kabupaten Karanganyar dalam menetapkan program kegiatan beserta besaran anggarannya.

Pj. BUPATI KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI



## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dalam menunjang tercapainya tujuan dan sasaran Kabupaten Karanganyar serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan sesama lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar baik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maupun dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Sebagai rencana tindak lanjut untuk tahun-tahun yang akan datang dengan keterbatasan kemampuan pendanaan dari pemerintah, dan Sumber Daya Manusia yang semakin sedikit jumlahnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berusaha meningkatkan nilai sistem Merit dengan bekerjasama dengan dinas terkait baik di tingkat yang lebih tinggi maupun yang sejajar dan tentunya memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan profesionalitas pegawai, melalui program dan kegiatan yang ada.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini kami susun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan umum penganggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2025 mendatang.

Dengan selesainya dokumen ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen formalitas rutin semata namun lebih daripada itu dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam perencanaan penganggaran pada Tahun 2025 serta menjadi pedoman BKPSDM Kabupaten Karanganyar dalam menetapkan program kegiatan beserta besaran anggarannya.

Pj. BUPATI KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI

